

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Transparansi merupakan suatu perwujudan tata kelola yang baik, yang memungkinkan publik mengetahui apa yang pemerintah lakukan. Untuk memenuhi hak-hak rakyatnya, pemerintah harus menyediakan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat (Nugraha, Sjoraida, & Novianti, 2022). Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar fundamental dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Transparansi ini penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami bagaimana keuangan daerah digunakan, dapat membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana daerah karena semua informasi keuangan tersedia untuk publik, serta memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah. Menurut Puroh-Cid et al., (2019) transparansi adalah sebuah solusi dalam mereduksi kemungkinan terjadinya kasus korupsi, mendorong kinerja keuangan, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah dengan publikasi laporan keuangan di internet. Dikarenakan saat ini internet merupakan media yang paling mudah dijangkau oleh publik dan yang paling *cost effective* bagi pemerintah untuk memberikan informasi kepada seluruh pihak. Setiap

masyarakat berhak mengetahui (*right to know*) setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan harapan bahwa setiap masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Transparansi telah menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, meskipun telah terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, namun tingkat transparansi di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan informasi keuangan daerah yang akurat dan mudah dipahami, kurangnya akuntabilitas, serta masyarakat masih kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi didefinisikan sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayainya serta kepatuhannya terhadap peraturan. Transparansi adalah cara pemerintah membuka kebijakan pengeluaran daerah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui rencana anggaran tahunan pemerintah daerah.

Negara adalah organisasi publik yang besar dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Tidak ada negara yang bebas dari korupsi, tetapi tingkat korupsi di seluruh dunia berbeda-beda. Korupsi yang melibatkan pejabat negara, termasuk kepala daerah, sangat umum di Indonesia. Untuk tingkat daerah, pemerintah berusaha mencegah korupsi dengan meningkatkan transparansi informasi keuangan daerah, yang merupakan salah satu masalah terbesar dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi dapat didistribusikan melalui media internet, misalnya melalui *website* masing-masing pemerintah daerah.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, lembaga di bawah naungan pemerintah (pusat atau daerah) diminta untuk membuat situs *web* yang menampilkan potensi daerah. Mengembangkan secara bertahap *e-government* melalui struktur yang nyata dan terukur adalah bagian dari pembangunan *website* pemerintah daerah. Mengunjungi *website* dapat dilakukan dengan mudah dimanapun dan cepat mendapatkan informasi yang diperlukan.

Salah satu cara untuk menerapkan pengembangan *e-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan dapat diukur adalah dengan menggunakan *website* pemerintah daerah, berdasarkan karakteristik informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. *Website* dapat menyajikan informasi, gambar, dan visualisasi dari individu dan organisasi yang membuatnya. *Website* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, tergantung pada cara pemiliknya membuatnya.

Tabel 1.1 : Ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur TA. 2022

No	Pemerintah Kabupaten			No	Pemerintah Kota		
	Kabupaten	Ada	Tidak Ada		Kota	Ada	Tidak Ada
1.	Bangkalan	✓		30.	Batu		✓
2.	Banyuwangi	✓		31.	Blitar		✓
3.	Blitar	✓		32.	Kediri	✓	
4.	Bojonegoro	✓		33.	Madiun	✓	
5.	Bondowoso	✓		34.	Malang	✓	
6.	Gresik		✓	35.	Mojokerto	✓	
7.	Jember	✓		36.	Pasuruan	✓	
8.	Jombang	✓		37.	Probolinggo	✓	
9.	Kediri	✓		38.	Surabaya	✓	
10.	Lamongan	✓					
11.	Lumajang		✓				
12.	Madiun	✓					
13.	Magetan	✓					
14.	Malang	✓					
15.	Mojokerto	✓					
16.	Nganjuk	✓					
17.	Ngawi	✓					
18.	Pacitan	✓					
19.	Pamekasan	✓					
20.	Pasuruan	✓					
21.	Ponorogo	✓					
22.	Probolinggo	✓					
23.	Sampang	✓					
24.	Sidoarjo	✓					
25.	Situbondo		✓				
26.	Sumenep	✓					
27.	Trenggalek	✓					
28.	Tuban	✓					
29.	Tulungagung	✓					

Sumber : Website Pemerintah Daerah se-Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

Untuk memastikan bahwa prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel dipenuhi, pemerintah daerah harus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan komponen utama dari tahap perencanaan dan penganggaran, sementara tahap

perencanaan merupakan salah satu tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 103 menetapkan persyaratan untuk tahapan penganggaran (penyusunan APBD) yang harus transparan. Berikut informasi data APBD yang tersedia di masing-masing Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sudah banyak yang menyediakan informasi dokumen APBD TA. 2022. Dengan masa anggaran satu tahun yang ditetapkan dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat dari sisi penyediaan informasi dokumen APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sudah termasuk transparan, meskipun masih ada beberapa pemerintah daerah yang belum melakukan keterbukaan pada *website*.

Selain transparansi terhadap pengelolaan keuangan, transparansi pemerintah daerah terkait aktivitas atau kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dilakukan juga salah satu hal penting bagi masyarakat. Kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) mengacu pada kinerja dalam aspek lingkungan, sosial dan tata kelola untuk menilai seberapa keberlanjutan (*sustainability*) praktik atau kinerja suatu pemerintah. Melalui kesadaran terhadap isu-isu ESG mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan,

serta pemerintahan yang transparan akan memiliki reputasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kinerja ESG secara umum berarti serangkaian dari aktivitas lingkungan, sosial serta pertimbangan tata kelola pada pemerintahan yang berpotensi memiliki dampak untuk membangun *value* jangka panjang bagi daerah maupun pemerintahnya. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai isu-isu sosial dan lingkungan, pemerintah juga terus didorong untuk tidak hanya melakukan transparansi pada pengelolaan keuangannya, namun juga kinerja-kinerja non-keuangan seperti kinerja ESG ini.

Dalam sektor pemerintahan, penerapan ESG masih tergolong baru diimplementasikan dan saat ini semakin menjadi fokus utama, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, selain pengungkapan pada pengelolaan keuangan, pemerintah juga diharuskan untuk melakukan pengungkapan ESG dengan menggunakan acuan pada teori keagenan dan teori *signalling*.

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur tingkat dan kategori transparansi dengan mengacu pada *Open Budget Indeks* yang dirancang oleh *International Budget Partnership* (IBP). IBP sendiri adalah organisasi independen dengan cakupan global yang melakukan survei transparansi anggaran yang dikenal sebagai *Open Budget Survey* (OBS). Survei ini menilai transparansi informasi tentang pengelolaan keuangan negara di seluruh dunia. Tujuan dari survei ini adalah untuk memberikan evaluasi terhadap kapasitas pemerintah untuk memberikan akses informasi yang tepat dan menyeluruh dengan menggunakan

kriteria dan bukti yang objektif kepada masyarakat umum (Huwae, 2016). Selain untuk menilai transparansi informasi keuangan, dalam penelitian ini juga menggunakan indeks tersebut untuk mengukur transparansi terhadap kinerja ESG pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini, peneliti membuat penelitian dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) Berbasis *Website* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, penelitian akan difokuskan kedalam beberapa rumusan permasalahan berikut:

1. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan daerah pada *website* Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023?
2. Bagaimana transparansi kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) pada *website* Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023?
3. Bagaimana tingkat transparansi seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti transparansi pengelolaan keuangan daerah pada *website* Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
2. Untuk meneliti transparansi kinerja *Environmental, Social and Governance* (ESG) pada *website* Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.
3. Untuk meneliti tingkat transparansi seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dari penelitian ini, yaitu:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Bagi pemerintah daerah khususnya daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat berfungsi sebagai umpan balik penting untuk pengembangan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berbasis *website*. Selain itu, hasil ini akan mendorong daerah lain untuk meningkatkan dan mengembangkan situs *website* resmi mereka untuk penyebaran informasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam memberikan informasi terkait manajemen dan pengelolaan pada pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi para pemerintah mengenai



pentingnya transparansi khususnya keuangan kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan pengembangan terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja ESG Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi di Jawa Timur.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan dengan penelitian lain, selain itu dapat pula dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam memahami transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja ESG.